



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

**RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO**

**Kantor Terpadu Gedung Graha Bakti Praja
Jalan Basuki Rahmat Lantai 1 dan 2**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 yang akan datang.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten ini, diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD Kabupaten dan APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih belum sempurna, namun harapan kami Rencana Kinerja Tahunan ini bisa dijadikan pedoman dalam melaksanakan program-program dibidang Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan berguna bagi kita semua.

Ponorogo, 31 Desember 2021

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700111 198903 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
SK Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	v

LAMPIRAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	44
3.3	Program dan Kegiatan	45
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	69
BAB V	PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan 2020 Kabupaten Ponorogo	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo	19
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Ponorogo	23
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Ponorogo	43
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Ponorogo	48
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	70



DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.4 /~~65351~~/ 405.09 / 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2022 dengan menuangkannya dalam suatu keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.4/6447/405.09/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;
- (2) Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Kesehatan periode 1 (satu) tahun;
- (3) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan merupakan :

- (1) Penjabaran lebih lanjut atas tujuan dan sasaran Kepala Dinas Kesehatan yang telah dijabarkan melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026;
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan DPA Dinas Kesehatan;

- (2) Rencana Kerja Dinas Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan program dan kegiatan kabupaten dengan Propinsi.

Pasal 4

- (1) Sistematisa Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. Bab V : Penutup.
- (2) Isi dan uraian Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 28 SEP 2021



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
- c. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk tahun 2022.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo melakukan penyusunan Renja PD tahun 2022 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Ponorogo. Digunakannya substansi sasaran dan formula indikator Renstra

atau RPJMD Tahun 2021–2026 sebagai acuan dalam penyusunan Renja PD tahun 2022 didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi pokok Organisasi Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan.
- b. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja tahun 2022 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- c. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ponorogo.

Dalam dokumen Renja PD, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja PD tahun 2022 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD pada tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang;
- c. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- d. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- m. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021;
- o. Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi pokok Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo;
- p. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2022;
- q. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.4/6447/405.09/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo disusun dengan maksud untuk menyamakan tujuan dan sasaran serta memberi arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam penyelenggaraan program kerja kesehatan, mendukung program kerja kepala daerah selama 5 (lima) tahun yang akan datang, serta menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini dicapai dengan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemanfaatan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan serta kebijakan kesehatan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo ini adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan yang disusun agar terdapat kesesuaian dan keselarasan dalam perencanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan jajarannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Sebagai alat evaluasi capaian dan kinerja Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen harus dievaluasi dalam perencanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2021. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi perangkat daerah. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Alokasi anggaran dan belanja untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	DINAS KESEHATAN	255.204.533.344,52	203.355.018.350,13	79,7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.101.000	141.755.800	91,4
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.431.649.935	74.270.744.721	97,2
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.260.386	494.852.650	86,5

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.102.874.020	1.082.815.750	98,2
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.219.720	554.374.174	99,3
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.432.100	225.466.918	93,8
1.7	Peningkatan Pelayanan BLUD	48.981.529.337,52	38.746.109.070	79,1
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
2.8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	22.635.816.004	18.601.885.667	82,2
2.9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.651.829.001	58.170.250.350	64,2
2.11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	57.243.000	54.070.000	94,5
2.12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.084.178.679	1.353.407.405	64,9
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
3.13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9.260.916.661	7.943.708.895	85,8
3.14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	579.111.000	201.434.000	34,8
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			
4.15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.449.000	20.200.000	99,45

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN		
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.745.000	79.150.000	98,8
4.17	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	110.597.000	99.705.950	90,2
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
5.18	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1.664.581.500	1.315.087.000	79

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021, dimana program dan kegiatan tertuang dalam KUA PPAS Tahun 2020. Pada Tahun 2020 alokasi dana ditujukan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa

Adapun pencapaian indikator sasaran tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	3.2 Bimbingan teknis / workshop / lokakarya implementasi peraturan perundang-undangan									
	3.3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN									
1.02.01.03	4. Peningkatan Displin Aparatur	Persentase pegawai mendapatkan pakaian kerja	100%	100%	-	-	-	-	-	-
1.02.01.05	5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	a. Rasio dokter	1/62.000	1/62.000	-	-	-	-	-	-
		b. Rasio dokte gigi	1/289.605	1/289.605	-	-	-	-	-	-
		c. Rasio bidan	1/1.684	1/1.684	-	-	-	-	-	-
1.02.01.06	6. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD									
	6.2 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran / prognosis realisasi anggaran dan akhir tahun									
1.02.01.16	7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Persentase gizi buruk mendapat perawatan	80%	82%	46%	37%	80%	46%	37%	80%
	7.1 Perbaikan gizi masyarakat	b. Persentase K4	7.20%	18.03%	7%	10%	139%	7%	10%	139%
	7.2 Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak,remaja, lansia)	c. Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	100.00%	100.00%	100%	79%	79%	100%	79%	79%
		d. Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD								
	7.3 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	e. Persentase pelayanan kesehatan pada usila	93.54%	86%	94%	71%	76%	94%	71%	76%
		f. Persentase peserta KB aktif								
	7.4 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan & Pengembangan UKBM	g. Persentase rumah tangga ber-PHBS	77.83%	89%	78%	62%	80%	78%	62%	80%
	7.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (DAK)	h. % Sekolah Pendidikan Tingkat Dasar Ber-PHBS	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	7.6 Dukungan Manajemen BOK dan Jaminan Persalinan (DAK BOK)	i. % Pondok Pesantren yang Ber-PHBS j. % posyandu PURI k. % desa siaga aktif l. % penduduk yang akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat m. % pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
1.02.01.44.01	8. Penurunan Stunting 8.1 Penyediaan obat gizi (vitamin A merah, vit A biru, TTD ibu hamil, TTD remaja putri dan mineral mix) (DAK Penugasan)	Persentase jumlah obat gizi terpenuhi sesuai rencana	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%
1.02.01.19	9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Berstrata PURI	0%	0%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%
1.02.01.20	10. Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%
1.02.01.21	11. Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar yang	80%	80%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%
1.02.01.22	12. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	a. Persentase penderita HIV/AIDS mendapat ARV	100%	85%	64%	49%	76%	64%	49%	76%
	12.1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	b. Succes rate pasien TB paru	100%	78%	67%	66%	98%	67%	66%	98%
	12.2 Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi	c. Insiden rate penyakit DBD	100%	81%	76%	48%	63%	76%	48%	100%
	12.3 Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa	d. RFT rate kasus kusta e. Cakupan penderita hipertensi diobati f. Cakupan penderita diabetes diobati g. Persentase pasien ODGJ pasung diobati h. Persentase KLB ditangani <24 jam i. Persentase penyakit potensial KLB terpantau j. Persentase imunisasi dasar lengkap	100%	95%	50%	33%	90%	50%	33%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.45	13. Program Pengendalian Penyakit	Persentase pengadaan alat dan bahan medis habis pakai pengendalian penyakit terpenuhi	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	100%	0%	0%
	13.1 Penyediaan Cryotherapy, vaccine carrier, posbindu kit dan pengadaan BHP pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload (DAK Penugasan)									
1.02.01.23	14. Standarisasi Pelayanan Kesehatan	a. Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar	100%	100%	15%	3%	17%	15%	3%	17%
	14.1 Akreditasi Puskesmas (DAK)	b. Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	100%	100%	30%	5%	17%	30%	5%	17%
	14.2 Akreditasi Labkesda (DAK)	c. % puskesmas te-reakreditasi d. Persentase labkesda terakreditasi	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
1.02.01.23	15. Program Pelayanan Dasar	a. % renovasi puskesmas terlaksana sesuai rencana	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%
	15.1 Penyediaan sarana puskesmas non afirmasi (DAK)	b. Persentase alat kesehatan terpenuhi sesuai rencana	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%
	15.2 Penyediaan alat kesehatan puskesmas non afirmasi (DAK)									
1.02.01.25	16. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase sarana dan prasarana fasyankes yang layak fungsi	100%	75%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	#DIV/0!
1.02.01.28	17. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas dengan hasil capaian KBPKP 95 %	100%	83%	85%	83%	98%	85%	83%	98%
	17.1 Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat		100%	83%	85%	83%	98%	85%	83%	98%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	22.1 Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	c. % unit layanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar - Puskesmas - Rumah Sakit - Fasyankes lainnya	100%	78%	92%	72%	79%	92%	72%	79%
	22.2 Peningkatan Mutu Kesehatan Tradisional dan Komplementer	d. % Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	100%	89%	83%	83%	100%	83%	83%	100%
	22.3 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	e. Persentase Klinik Tradisional yang terstandar	100%	100%	100%	83%	83%	100%	83%	83%
1.02.01.40	23. Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	a. Persentase ketersediaan obat dan BMHP puskesmas sesuai rencana b. Persentase alkes terkalibrasi sesuai rencana	100%	100%	96%	88%	92%	100%	88%	88%
	23.1 Kegiatan Penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	c. Persentase ketersediaan alkes puskesmas	100%	100%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
	23.2 Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di Fasyankes	d. Cakupan SPKP dan SPP-IRT	100%	100%	87%	87%	100%	87%	87%	100%
	23.3 Peningkatan mutu dan keamanan pangan		100%	100%	100%	82%	82%	100%	82%	82%
1.02.01.42.01	24. Program Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase kebutuhan obat terpenuhi sesuai rencana	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%
	24.1 Kegiatan Pengadaan obat puskesmas, penyediaan bahan medis habis pakai puskesmas (DAK Reguler)									
1.02.01.41	25. Program Pelayanan Kesehatan pada UPT	Persentase UPT memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	83%	72%	86%	83%	72%	86%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	25.1 Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	a. Persentase kegiatan BLUD dilaksanakan	100%	100%	100%	90%	90%	100%	90%	90%
	25.2 Penyelenggaraan BOK Puskesmas	b. Persentase kegiatan BOK Puskesmas dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	76%	76%	100%	76%	76%
	25.3 Penyelenggaraan BOK UKM	c. Persentase kegiatan promotif preventif dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	66%	66%	100%	66%	66%
	25.4 Penyelenggaraan pelayanan Labkesda	d. Persentase kegiatan pelayanan labkesda dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	25.5 Penyelenggaraan pelayanan gudang farmasi	e. Persentase kegiatan gudang farmasi dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	100%	98%	98%	100%	98%	98%
	25.6 Penyelenggaraan Gudang Farmasi Elogistik (DAK BOK)	f. Persentase kegiatan distribusi obat dan elogistik dilaksanakan sesuai rencana	100%	100%	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Ponorogo termasuk dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 21 kecamatan, 26 kelurahan dan 281 desa. Secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan dengan Kabupaten Pacitan serta sebelah Barat dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah). Kondisi geografis dengan luas wilayah Kabupaten Ponorogo memberikan peluang dan tantangan karena mempunyai dampak terhadap timbulnya masalah kesehatan yang komprehensif, oleh karena itu program/kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki tolak ukur serta indikator yang lengkap sehingga akan mudah dalam melakukan evaluasi.

Capaian kinerja pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	95.01	349.86	23,75%
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	11.97	11.90	100%
3	Prevalensi Balita Stunting	<20%	15.6%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	81.49	93%
5	% Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3,2%	3.2%	100%
6	CFR Covid-19	< 10%	12%	60%
7	CFR HIV/AIDS	31.9%	13%	100%
8	CFR TB paru per 100.000 pddk	5.46	6.61	61%
9	Persentase Desa Bebas DBD	50%	1.6%	3%
10	Proporsi Penderita Kusta Anak per 10.000 penduduk	0%	6%	6%
11	Persentase Desa UCI	88.9%	92.2%	100%
12	Prevalensi Hipertensi	40.22%	6%	14.9%
13	Prevalensi Diabetes melitus	2.18%	2%	91.7%
14	CFR Covid-19	< 10%	12%	60%

Dari tabel capaian kinerja di atas hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan secara umum 54% sudah baik, sedangkan 56% sisanya masih menjadi tugas besar Dinas Kesehatan untuk memperbaikinya. Meskipun beberapa indikator dinilai kurang namun faktor penyebabnya diketahui sehingga bisa diupayakan untuk perbaikannya serta menjadi program prioritas tahun anggaran berikutnya. Dukungan anggaran kesehatan yang mencukupi, kerjasama lintas program dan lintas sektor serta peran serta masyarakat diharapkan akan ada korelasi yang positif dengan meningkatnya capaian program sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal.

Penanganan pandemi *Corona Virus 2019* (Covid-19) sampai dengan sekarang serta target vaksinasi covid-19 yang menjadi tolok ukur PPKM Mikro suatu wilayah, semakin memperberat kerja pelayanan kesehatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026. Terdapat perubahan yang signifikan, baik perubahan rencana kerja tahunan maupun refocusing anggaran. Fokus kegiatan tahun 2021 diarahkan untuk penanganan Covid-19 ini mulai dari kegiatan pelacakan kasus, pengobatan pasien terkonfirmasi Covid-19, operasional rumah karantina dan vaksinasi.

Memberikan pelayanan bermutu bagi masyarakat merupakan tujuan pembangunan kesehatan apalagi salah satu pilar utama program Indonesia sehat adalah JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Dengan puskesmas sebagai PPK-BLUD dimana puskesmas bisa mengelola keuangannya secara mandiri dan fleksible serta puskesmas terakreditasi, hal ini diharapkan semakin meningkatkan mutu akses puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi masyarakat, sehingga tujuan Dinas Kesehatan yaitu ***meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan*** dalam mendukung *Nawa Darma Nyata 3 : “Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional” Misi 2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya,* dapat tercapai sesuai dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Ponorogo

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	2021	2022	
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	-	96.89	97.09	96.99	96.89	96.79	95.01	349.86	96.79	96.79	Tidak Terpenuhi
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	-	23	24.74	23.87	23	22.13	11.97	11.9	22.13	22.13	Terpenuhi
3	Prevalensi balita stunting	<20%	-	25%	25.0%	24.8%	24.8%	16.9%	15.6%	0.248	25%	Terpenuhi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	80	79	80	82	84	88	81.49	84	84	Tidak Terpenuhi
5	% puskesmas terakreditasi	100%	-	67%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	Terpenuhi
6	% Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	-	60%	0%	13%	16%	16%	3.2%	3.2%	16%	16%	Tidak Terpenuhi
7	CFR Covid-19	-	-	-	-	-	10%	-	12%	10%	10%	Tidak Terpenuhi
8	CFR HIV/AIDS	-	40%	19%	18%	17%	17%	32%	13%	17%	17%	Terpenuhi
9	CFR TB paru per 100.000 pddk	-	0.92	2	2	2	2	5.46	6.61	2	2	Tidak Terpenuhi
10	Persentase Desa Bebas DBD	-	0%	6%	8%	10%	12%	50%	1.6%	0.12	12%	Tidak Terpenuhi
11	Proporsi penderita kusta anak	< 5%	-	< 5%	< 5%	< 5%	< 5%	0%	6%	< 5%	< 5%	Tidak Terpenuhi

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	2021	2022	
12	Persentase Desa UCI	85%	-	85%	85%	85%	85%	89%	92%	0.85	85%	Terpenuhi
13	Prevalensi Hipertensi	40%		30%	30%	30%	30%	15%	6%	0.3	30%	Tidak Terpenuhi
14	Prevalensi Diabetes melitus	2%	-	30%	30%	30%	30%	86%	1.5%	0.3	30%	Tidak Terpenuhi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan, serta dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, maka isu strategis pada urusan kesehatan di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Pandemi *Corona virus 2019 (COVID-19)* menjadi masalah kesehatan masyarakat, ekonomi dan social.
2. Vaksinasi *Corona virus 2019 (COVID-19)* belum memenuhi target.
3. Pengalihan dukungan kepesertaan PBID Provinsi ke PBID kabupaten.
4. Pemenuhan dan distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang belum sesuai standar.
5. Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas masih belum memenuhi standar.
6. Re-Akreditasi puskesmas dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terhambat akibat pandemi COVID-19.
7. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan ditambah adanya kecenderungan peningkatan kesakitan dan kematian karena penyakit degenerative.
8. Semakin tingginya kasus kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan khusus baik situasi KLB, bencana maupun kecelakaan.
9. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
10. Pola Perilaku Hidup Masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih banyak yang belum memenuhi paradigma sehat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Ponorogo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang

terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 didasarkan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022, agar di dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Identifikasi atas rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan yang dikonsolidasikan dalam KUA dan PPAS sebagai Dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	Program Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Terlaksananya administrasi perkantoran	1 Tahun	1,422,134	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas kesehatan	Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	90%		-
								Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu	90%		
1.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Kelancaran adm surat menyurat	1 Tahun	3,844	Penyediaan jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan	Dinas kesehatan	Persentase kegiatan administrasi kantor (surat, ATK, cetak/ penggandaan) yang dikelola	100%		-
1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	65,000						
1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	Kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	55,619						
1.4	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Kelancaran aktifitas kantor	1 Tahun	64,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas kesehatan	Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	100%		-
1.7	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Dinas Kesehatan	Kelancaran pengelolaan adm keuangan dinkes	1 Tahun	170,100	Penyediaan jasa administrasi keuangan dan teknis kegiatan	Dinas kesehatan	Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	100%		-
1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	Kebersihan kantor terjaga	1 Tahun	32,932	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dinas kesehatan	Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	100%		-
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran administrasi kantor	1 Tahun	4,400	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas kesehatan	Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	100%		-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran kegiatan kantor	1 Tahun	133,000						
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Kelancaran kegiatan kantor	1 Tahun	17,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas kesehatan	Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	100%	-	
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	175,740	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas kesehatan	Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	100%	-	
1.13	Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	367,000	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Dinas kesehatan	Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinas nya sesuai kebutuhan	100%	-	
1.14	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis kegiatan	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	333,500						
2	Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	Dinas Kesehatan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	1 Tahun	473,972	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas kesehatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	90%	-	
2.15	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Dinas Kesehatan	KLB tertangani kurang dari 24 jam	1 Tahun	-	Pengadaan mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/ operasional	Dinas kesehatan	Persentase pengadaan kendaraan dinas sesuai rencana	100%	-	
2.16	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Kesehatan		1 Tahun	-	Pengadaan peralatan, perlengkapan gedung kantor dan rumah jabatan/ rumah dinas	Dinas kesehatan	Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana	100%	-	
2.17	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Tersedianya peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan	1 Tahun	175,000						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2.18	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Dinas Kesehatan	Keamanan & Kenyamanan kerja	1 Tahun	-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sarana prasarana penunjang gedung kantor, rumah jabatan dan rumdin	Dinas kesehatan	Persentase jasa pemeliharaan gedung dan sarpras dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	
2.19	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	213,972	Pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas jabatan, kendaraan dinas/operasional	Dinas kesehatan	Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	
2.20	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	25,000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Dinas kesehatan	Persentase jasa pemeliharaan mebeleur, peralatan dan perlengkapan	100%	-	
2.21	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	60,000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, sarpras penunjang gedung kantor, rumah jabatan & rumah dinas	Dinas kesehatan	Persentase pembangunan/ renovasi/ rehab gedung dan sarpras sesuai rencana	100%	-	
3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Dinas Kesehatan	Kenyamanan kerja	1 Tahun	5,000	Program Peningkatan disiplin Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas kesehatan	Prosentase ASN bidang kesehatan lulus pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan sesuai rencana	100%	-	
								Persentase pejabat fungsional memenuhi angka kredit	100%		
3.22	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Dinas Kesehatan	Kelancaran pelaksanaan tugas	1 Tahun	5,000	Pengadaan Pakaian Dinas	Dinas kesehatan	Jumlah pegawai yg mendapatkan	100 Org	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
4	Program Peningkatan Disiplin dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kesehatan	-	1 Tahun	593,902			pakaian dinas			
4.23	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	pemantapan implementasi peraturan perundangan kesehatan dan lainnya	1 Tahun	44,620	Bimtek / workshop / lokakarya implementasi peraturan perundang-undangan	Dinas kesehatan	Jumlah tenaga yang mengikuti Bimbingan teknis Renbutnakes dan SISDMK	31 Org		-
4.24	Pendidikan dan pelatihan formal	Dinas Kesehatan	SDM kesehatan yang berkompeten	1 Tahun	350,000	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi ASN	Dinas kesehatan	Jumlah program dokter internship	3 angk		-
4.25	Registrasi dan akreditasi Nakes	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya hak tenaga fungsional	1 Tahun	141,802			Jumlah nakes teladan dibina	7 orang		
4.26	Penilaian Nakes Teladan	Dinas Kesehatan	Peningkatan motivasi & prestasi kerja petugas	1 Tahun	57,480			Persentase pembinaan institusi diknakes	100%		
								Jumlah ASN yg mengikuti diklat/workshop/ seminar/ lokakarya/ bimtek	35 orang		
								Jumlah uji kompetensi jabfung perawat dan perawat gigi	2 kali		
5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	230,000	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas kesehatan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	95%		-
5.27	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Terukurnya kinerja kegiatan	1 Tahun	70,000	Penyus laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dinas kesehatan	Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah	3 dokumen		-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
5.28	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Dinas Kesehatan	Tersusunnya renstra dan renja SKPD	1 Tahun	10,000			Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen		
								Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan	5 dokumen		
								Persentase rekomendasi penelitian yang diterbitkan	100%		
								Jumlah aplikasi perencanaan dan pelaporan dikelola	13 aplikasi		
								Jumlah kegiatan manajemen BOK yang dilaksanakan sesuai rencana	11 keg		
5.29	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dinas Kesehatan	Meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan OPD	1 Tahun	60,000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	Dinas kesehatan	Persentase dokumen SPP/SPM yang diterbitkan	100%	-	
5.3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dinas Kesehatan	Meningkatkan ketepatan pelaporan keuangan OPD	1 Tahun	90,000			Persentase dokumen laporan keuangan diselesaikan tepat waktu	100%		
6	Program Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	46,817,242	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas kesehatan	Persentase K4	90%	-	
								Persentase persalinan oleh nakes	98%		
								Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD	100%		
								Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	59%		
								Persentase peserta KB aktif	74%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Persentase gizi buruk mendapat perawatan	100%		
								Persentase rumah tangga ber-PHBS	80%		
								Persentase sekolah tingkat dasar ber-PHBS	71%		
								Persentase Pondok Pesantren yang Ber-PHBS	70%		
								Persentase Posyandu PURI	75%		
								Persentase Desa Siaga Aktif	100%		
								Persentase penduduk yang akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat	90%		
								Persentase pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas	80%		
6.31	Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Dinas Kesehatan	Tersedianya obat dan alat kesehatan	1 Tahun	3,247,125	Perbaikan gizi masyarakat	Dinas kesehatan	Persentase bayi BBLR	<5 %		-
								Persentase balita BGM	< 1 %		
								Persentase bumil KEK	< 21,1 %		
6.32	Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya (jamkesda non maskin)	Dinas Kesehatan	peningkatan kinerja puskesmas, pementapan implementasi SPM	1 Tahun	-	Peningkatan kesehatan masyarakat (ibu, bayi, anak, remaja, lansia)	Dinas kesehatan	Persentase Kunjungan minimal 4x pd Bumil dgn frekuensi 1-1-2	95%		-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
6.33	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus	Dinas Kesehatan	Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rujukan dan khusus	1 Tahun	-			Persentase bumil komplikasi ditangani	<20%		
6.34	Operasional dan Pemeliharaan Labkesda	Dinas Kesehatan	Tercukupinya biaya operasional pelayanan kesehatan di labkesda	1 Tahun	260,000			Persentase neonatus komplikasi ditangani	<15%		
6.35	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Dinas Kesehatan	Peningkatan cakupan KIA (Ki,K4,Ibu nifas, KN)	1 Tahun	2,396,125			Persentase persalinan ditolong oleh Nakes yg kompeten	97%		
6.36	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (BOK)	Dinas Kesehatan	Peningkatan cakupan pelayanan UKM	1 Tahun	7,636,000			Persentase murid SD dilakukan penjangkaran kesehatan	100%		
								Persentase Usila mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan	57%		
								Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS	69%		
6.37	Operasional dan pemeliharaan Depo Farmasi dan Alkes	Dinas Kesehatan		1 Tahun	65,000	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesh olahraga	Dinas kesehatan	Persentase rumah tangga yang akses jamban sehat	87%		-
6.38	Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan BLUD puskesmas	Dinas Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar	1 Tahun	33,212,992			Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat	85%		
								Persentase rumah tangga dibina dan memenuhi syarat	75%		
								Persentase TTU memenuhi syarat	63%		
								Persentase TPM memenuhi syarat	45%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Persentase desa/kel ODF	70%		
								Persentase desa/kel melaksanakan STBM	80%		
								Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi	10%		
								Persentase pekerja informal yang mendapatkan konseling	35%		
								Persentase kelompok kesehatan kerja yang diberikan penyuluhan promotif dan preventif	35%		
								Persentase club olahraga yang dibina	35%		
								Persentase anak sekolah (kelas 4-6 SD) yang diukur kebugaran	30%		
						Penyelenggaraan promosi kesehatan	Dinas kesehatan	Persentase rumah tangga dikaji	20%	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
						dan pengembangan UKBM		Persentase sekolah pendidikan dasar yang diberi penyuluhan kesehatan	100%		
								Persentase pondok pesantren yang diberi penyuluhan kesehatan	70%		
								Persentase kader posyandu dibina	100%		
								Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya	85%		
								Persentase kader desa siaga yang dibina	85%		
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan		1 Tahun	7,626,000						
7.39	Penanggulangan KEP,anemi gizi besi,GAKY,KVA dan gizi mikro lainnya	Dinas Kesehatan	Gizi buruk yang tertangani	1 Tahun	7,626,000						
7.40	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar	Dinas Kesehatan	Bumil KEK tertangani, Pemberian MP-ASI	1 Tahun	-						
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan		1 Tahun	196,460						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
8.41	Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan peningkatan Peran Serta Masyarakat	Dinas Kesehatan	Desa siaga aktif	1 Tahun	196,460						
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan		1 Tahun	8,394,000						
9.42	Peningkatan sanitasi dasar, Pengawasan kualitas air bersih dan limbah rumah tangga	Dinas Kesehatan	Cakupan jamban keluarga	1 Tahun	8,394,000						
9.43	Peningkatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	Dinas Kesehatan	Persentase petugas puskesmas dilatih tentang tentang kesehatan kerja dan kesehatan olahraga	1 Tahun	-						
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan		1 Tahun	3,344,015	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas kesehatan	Persentase penderita HIV/AIDS mendapat ARV	78%	-	
								Succes rate pasien TB paru	90%		
								Insiden rate Penyakit DBD	<47 per 100.000 pddk		
								RFT rate kasus kusta	PB 100% MB 95%		
								Cakupan Penderita Hipertensi diobati	30%		
								Cakupan Penderita Diabetes diobati	30%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Persentase pasien ODGJ pasung diobati	100%		
								Persentase KLB ditangani <24 jam	100%		
								Persentase penyakit potensial KLB terpantau	100%		
								Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	93%		
10.44	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas Kesehatan	Penemuan dan penanganan kasus, prevalensi dan insiden penyakit	1 Tahun	2,690,965	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Dinas kesehatan	Prevalensi penyakit HIV/AIDS	<0.5 per 10.000 pddk		-
								Insiden rate Penyakit TB paru	303 kasus per 100.000 penduduk		
								Angka Bebas Jentik (ABJ)	95%		
								Prevalensi penyakit Kusta	<5 per 10.000 penduduk		
								Angka Kejadian Malaria (API)	< 1 per 1000 pddk		
								Persentase Penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis	100%		
								Persentase Penemuan dan pengobatan kasus filariasis	100%		
								Persentase Penemuan dan pengobatan pneumonia balita	90%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Persentase Penemuan dan pengobatan kasus diare	100%		
10.45	Peningkatan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Cakupan desa UCI	1 Tahun	-	Peningkatan imunisasi dan surveilans epidemiologi	Dinas kesehatan	Jumlah penyakit potensial KLB	23 peny	-	
10.46	Peningkatan surveilliance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Dinas Kesehatan	KLB tertangani < 24 jam dan kematian karena KLB dapat dicegah	1 Tahun	653,050		Jumlah penemuan kasus bukan campak pada populasi	18 kasus			
							Jumlah penemuan kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun	5 kasus			
							Persentase pemeriksaan kesehatan CJH	100%			
							Cakupan Imunisasi Hb0	95%			
							Cakupan Imunisasi BCG	95%			
							Cakupan Imunisasi Polio	95%			
							Cakupan Imunisasi DPT-HB	95%			
							Cakupan Imunisasi MR	95%			
									Cakupan imunisasi baduta	80%	
								Cakupan BIAS	95%		
								Cakupan TT WUS	30%		
10.47	Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)	Dinas Kesehatan	Penemuan dan penanganan kasus PTM	1 Tahun	-	Penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM) dan kesehatan jiwa	Dinas kesehatan	Persentase desa yg melaksanakan posbindu PTM	75%	-	
10.48	Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	Cakupan pasien jiwa ditemukan dan dirawat	1 Tahun	-		Jumlah kader posbindu dilatih	200 kader			
						Jumlah petugas kesehatan yang diberi sosialisasi tentang IVA	62 orang				

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Jumlah PAUD dan TK diperiksa kesehatan gigi dan mulut	100 unit		
								Jumlah penemuan suspek katarak	200 pasien		
								Persentase pasien ODGJ pasung dikunjungi	100%		
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	5,291,001	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase FKTP terakreditasi	75%	-	
11.49	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Tercap kinerja puskesmas, terlaks. prog CHN, tersusunnya SOP dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan data yg valid	1 Tahun	4,000,705						
11.50	Akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya	Dinas Kesehatan	Puskesmas terakreditasi	1 Tahun	1,290,296	Akreditasi Puskesmas dan FKTP lainnya	Dinas Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi	100%	-	
12	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Dinas Kesehatan		1 Tahun	9,050,000						
12.51	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Kualitas dan jangkauan pelayanan	1 Tahun	-						
12.52	Rehabilitasi sedang / berat puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Terehabnya puskesmas dan jaringannya shg memenuhi standar	1 Tahun	-						

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
12.53	Rehabilitasi dan atau perluasan puskesmas dan jaringannya	Dinas Kesehatan	Terehabnya unit sarana pelayanan kesehatan sehingga kenyamanan dan keamanan pelayanan terwujud	1 Tahun	9,050,000						
13	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan		1 Tahun	79,500						
13.54	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan usaha dan pra usaha meningkat	1 Tahun	79,500						
14	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	3,918,261	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas kesehatan	Persentase Puskesmas dengan hasil capaian KBPKP 95 %	85%	-	
14.55	Kemitraan Asuransi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase Kepesertaan JKN	1 Tahun	3,918,261	Kemitraan Asuransi Kesehatan	Dinas kesehatan	Persentase peserta PBID yang dibayarkan preminya	100%	-	
15	Program Pelayanan Administrasi perkantoran AKPER	Dinas Kesehatan		1 Tahun	300,000			Persentase Puskesmas dengan Angka Kontak aman	10%		
15.56	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan		1 Tahun	300,000			Persentase Puskesmas dengan Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik aman	100%		
15.57	Peningkatan kinerja mahasiswa melalui praktek lap, penelitian & pengabdian masyarakat	Dinas Kesehatan		1 Tahun	-			Persentase Puskesmas dengan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung aman	80%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
16	Program peningkatan mutu dan pelayanan BLUD AKPER	Dinas Kesehatan		1 Tahun	2,912,525						
16.58	Operasional BLUD AKPER	Dinas Kesehatan	Terselenggara-nya operasional pendidikan di AKPER	1 Tahun	2,912,525						
17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Dinas Kesehatan		1 Tahun	-	Program Pembinaan Lingkungan Sosial		Persentase kegiatan pendukung DBHCHT dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	
17.59	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	1 Tahun	-	Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS	Dinas kesehatan	Persentase gedung dan sarana prasarana kesehatan dikelola sesuai rencana	100%	-	
						Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif / rehabilitative	Dinas kesehatan	Persentase kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif / rehabilitatif dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	
						Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada faskes yang bekerjasama dengan BPJS	Dinas kesehatan	Persentase diklat, bimtek, workshop dilaksanakan sesuai rencana	100%	-	
18	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	-	Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	Dinas kesehatan	Persentase Puskesmas dengan nilai pemantauan standar 80%	100%	-	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								% klinik yang mendapat rekomendasi ijin operasional	100%		
								% unit layanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar - Puskesmas - Rumah Sakit	100%		
								% Puskesmas dengan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	100%		
								Persentase Klinik Tradisional yang terstandar	30%		
18.60	Peningkatan mutu kesehatan tradisional dan komplementer	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana pengobatan tradisional yang dibina	1 Tahun	-	Peningkatan Mutu Kesehatan Tradisional dan Komplementer	Dinas Kesehatan	Persentase pemegang program Puskesmas yang mendapat sosialisasi tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	100%		-
								Persentase Puskesmas/ Penyehat Tradisional yang dibina	100%		
								Persentase hattra yang memiliki STPT	3%		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
						Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan primer	Dinas kesehatan	Persentase Puskesmas yang dievaluasi	100%		-
								Persentase Puskesmas dengan hasil penilaian kinerja cukup	90%		
								Persentase klinik yang mengajukan ijin operasional dengan kondisi standar	100%		
						Evaluasi dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan	Dinas kesehatan	Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	80%		-
								Persentase puskesmas yg memiliki tim krisis kesehatan	64%		
								Jumlah RS yg melakukan akreditasi versi 2012	6 RS		
								Persentase pelaporan krisis kesehatan dengan form RHA	90%		
								Jumlah tim ambulan desa siaga tersosialisasi Bantuan Hidup Dasar	50 Tim		
								Jumlah laboratorium yg melakukan perpanjangan ijin operasional	2 Lab		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
								Jumlah laboratorium yang terakreditasi	1 Lab		
								Persentase kantong darah tersedia di PMI per jumlah penduduk	2%		
19	Program kefarmasian, alat kesehatan dan pengamanan makanan	Dinas Kesehatan		1 Tahun	10,871,075	Program kefarmasian, alat kesehatan dan pengamanan makanan	Dinas kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan BMHP puskesmas sesuai rencana	100%		-
								Persentase alkes terkalibrasi sesuai rencana	100%		
								Persentase ketersediaan alkes puskesmas	70%		
								Prosentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	100%		
19.61	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan obat dan BHP	1 Tahun	7,482,625	Kegiatan Penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase jumlah dan jenis obat, BMHP sesuai rencana	100%		-
19.62	Pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	Tercukupinya distribusi obat secara merata	1 Tahun	112,900						
19.63	Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan alkes di puskesmas	1 Tahun	3,247,125	Pengadaan, pemeliharaan dan standarisasi peralatan kesehatan di fasilitas yankes	Dinas Kesehatan	Persentase Alkes yang Terkalibrasi sesuai rencana	100%		-
								Jumlah penyediaan alkes sesuai rencana	180 item		
19.64	Peningkatan mutu dan keamanan	Dinas Kesehatan	Terpenuhinya sertifikat SPKP dan	1 Tahun	28,425	Peningkatan mutu dan keamanan	Dinas Kesehatan	Jumlah SPKP yang diterbitkan	150 sertifikat		-

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	pangan		SPP-IRT					Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan	100%		
						Program Yankes pada UPT	UPT	Persentase UPT memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		-
						Penyelenggaraan BOK UKM	Dinas kesehatan	Persentase kegiatan promotif preventif dilaksanakan sesuai rencana	100%		-
						Penyelenggaraan pelayanan Labkesda	Labkesda	% kegiatan pelayanan labkesda dilaksanakan sesuai rencana	100%		-
						Penyelenggaraan pelayanan Gudang Farmasi	IFK	% kegiatan GFK dilaksanakan sesuai rencana	100%		-
						Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	Puskesmas	Persentase kegiatan BLUD dilaksanakan sesuai rencana	100%		-
						Penyelenggaraan BOK Puskesmas	Puskesmas	Persentase kegiatan BOK Puskesmas dilaksanakan sesuai rencana	100%		-

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memacu keikutsertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain dalam era globalisasi, Perangkat Daerah dituntut untuk siap dan sanggup membuat dan menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Program Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah 2022 telah mengakomodir usulan serta masukan masyarakat, kebutuhan pemerintah daerah dan telah sesuai dengan Program dalam Renstra Perangkat Daerah serta telah mampu mendukung capain kinerja sasaran Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
	A. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Desa	Persentase posyandu balita ditingkatkan kualitas layanannya	96 Posyandu	Bantuan Operasional, sarana prasarana
		Desa	Persentase posyandu lansia ditingkatkan kualitas layanannya	96 Posyandu	Bantuan Operasional, sarana prasarana
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	A. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Desa	Persentase balita gizi buruk ditangani	6 Desa	Pengadaan PMT bagi Balita Gizi Buruk dan
	B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	1) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Desa	Jumlah pengadaan ambulan desa	1 unit (1 desa)	Ambulan Siaga Desa
	C. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	2 desa	Koordinasi antara Dinkes dan PPKB

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Sasaran Indikator Kementerian Kesehatan periode 2020-2024 juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan **Nawa Darma Nyata 3** : *“Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional; Misi 2, “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya”* menetapkan **Tujuan** yaitu *“Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.”*

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
 - c. Prevalensi balita stunting
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - b. Persentase puskesmas terakreditasi
 - c. Persentase Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN
3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut :
 - a. CFR Covid-19
 - b. CFR HIV/AIDS
 - c. CFR TB paru per 100.000 penduduk
 - d. Persentase Desa Bebas DBD
 - e. Proporsi penderita kusta anak
 - f. Persentase Desa UCI
 - g. Prevalensi Hipertensi
 - h. Prevalensi Diabetes melitus

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja tahun 2022 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Kesatu - Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, meliputi kegiatan :
 - a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Sasaran Kedua - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi.
 - c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi kegiatan :
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, meliputi kegiatan :
 - a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
 - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

Sasaran Ketiga - Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, maka dirumuskan program sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan :

- a. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping itu untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo juga direncanakan beberapa program dan kegiatan rutin sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - c. Peningkatan Pelayanan BLUD.

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja dibiayai dari sumber dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni, Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (BK) Provinsi.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Ponorogo

Nama Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	a. Persentase tingkat kepuasan pegawai mendapatkan pelayanan umum kantor	Dinkes	81%	122,742,378,466.71	APBD		82%	126,267,091,381.45
		b. Persentase sarana prasarana kantor memenuhi standar		81%				82%	
		c. Nilai LKE SKPD			A			A	
2.01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.1 Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Dinkes	85%	256,273,569.32	APBD		85%	269,087,247.78
01	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai juknis	Dinkes	6 dok	174,475,826.29	APBD		6 dok	183,199,617.60
		b) Jumlah dokumen usulan anggaran yang disusun sesuai timeline dan juknis		6 dok				6 dok	
		c) Jumlah dokumen hubungan kausal dan fungsional yang dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku		2 dok				2 dok	
		d) Jumlah aplikasi perencanaan dan dikelola sesuai peruntukannya		9 apl				9 apl	
07	2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a) Jumlah dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun tepat waktu	Dinkes	3 dok	81,797,743.03	APBD		3 dok	85,887,630.18
		b) Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah yang disusun tepat waktu dan sesuai sistematika		3 dok				3 dok	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		c) Jumlah dokumen laporan realisasi program dan kegiatan dilaporkan tepat waktu		6 dok				6 dok	
		d) Jumlah dokumen laporan kinerja program kesehatan		7 dok				7 dok	
2.02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a.2 Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan SK	Dinkes	100%	72,738,656,399.52	APBD		100%	74,824,205,875.28
		b.2 Persentase SPP-SPM yang diterbitkan dalam satu tahun		100%				100%	
		c.2 Persentase dokumen laporan keuangan diselesaikan tepat waktu		90%				90%	
01	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	a) Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	Dinkes	1035 org	71,625,527,408.88	APBD		1035 org	73,679,161,453.46
02	2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	a) Jumlah dokumen SPP/SPM yang diterbitkan sesuai pengajuan	Dinkes	5000 dok	1,008,386,826.43	APBD		5000 dok	1,037,299,109.40
08	3) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	a) Jumlah dokumen laporan keuangan yang dikerjakan	Dinkes	5 dok	104,742,164.21	APBD		5 dok	107,745,312.42
2.06	1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	a.3 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	Dinkes	90%	446,432,700.84	APBD		90%	459,232,737.73
01	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	a) Persentase komponen listrik disediakan sesuai rencana	Dinkes	100%	10,492,056.49	APBD		100%	10,792,882.81
04	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a) Persentase makanan minuman disediakan sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	298,532,273.48	APBD		100%	307,091,736.32
		b) Persentase kegiatan Pengadaan ATK yang dikelola sesuai rencana		100%				100%	
05	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	a) Persentase kegiatan cetak/penggandaan yang dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	27,268,013.17	APBD		100%	28,049,836.67
06	4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	a) Persentase media cetak dan peraturan hukum disediakan sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	5,215,595.19	APBD		100%	5,365,135.79

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
09	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a) Persentase pegawai yang dibiayai perjalanan dinasnya sesuai kebutuhan	Dinkes	100%	104,924,762.51	APBD		100%	107,933,146.15
2.07	1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a.4 Persentase kebutuhan kendaraan operasional tercukupi	Dinkes	0%	615,632,905.37	APBD		0%	633,284,219.63
		b.4 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		70%				70%	
02	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Persentase pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai rencana	Dinkes	0%	288,589,271.20	APBD		0%	296,863,650.09
11	2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	a. Persentase pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai rencana	Dinkes	100%	327,043,634.17	APBD		100%	336,420,569.54
2.08	1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.5 Persentase administrasi perkantoran sesuai SOP	Dinkes	90%	733,591,405.64	APBD		91%	754,624,804.48
		b.5 Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu		85%				87%	
01	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a) Persentase kegiatan administrasi kantor (surat menyurat) yang dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	18,679,596.46	APBD		100%	19,215,174.44
02	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	a) Persentase komponen pendukung perkantoran (telpon, air, listrik) dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	587,310,226.44	APBD		100%	604,149,478.02
04	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a) Persentase jasa administrasi dikelola sesuai rencana	Dinkes	100%	127,601,582.74	APBD		100%	131,260,152.02
		b) Persentase jasa kebersihan kantor dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%		APBD		100%	
2.09	1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.6 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Dinkes	75%	288,998,018.55	APBD		77%	297,284,116.97
02	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	a) Persentase jasa pemeliharaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	263,050,799.76	APBD		100%	270,592,944.27

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Dinas Operasional atau Lapangan	b) Persentase kendaraan dinas yang diurus pajaknya sesuai rencana		100%				100%	
05	2) Pemeliharaan Mebelair	a) Persentase jasa pemeliharaan mebeleur dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	0%	0	APBD		0%	0
06	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	a) Persentase jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	25,947,218.79	APBD		100%	26,691,172.71
2.10	1.7 Peningkatan Pelayanan BLUD	a.7 Indeks Kepuasan Masyarakat wilayah puskesmas	Puskesmas	85	47,662,793,467.47	PAD		85	49,029,372,379.57
		b.7 Strata Akreditasi		Dasar / Madya / Utama / Paripurna				Dasar / Madya / Utama / Paripurna	
		c.7 Persentase Nilai PKP		77%				78%	
01	1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponorogo Utara	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,595,800,020.47	PAD		100%	1,641,554,507.30
01	2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponorogo Selatan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,516,669,909.56	PAD		100%	1,560,155,592.30
01	3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Siman	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	710,385,045.09	PAD		100%	730,753,075.40
01	4) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ronowijayan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	628,253,479.84	PAD		100%	646,266,648.90
01	5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jenangan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,995,345,562.60	PAD		100%	2,052,555,746.27
01	6) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Setono	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	791,846,983.55	PAD		100%	814,550,675.68

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01	7) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Babadan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,140,069,630.24	PAD		100%	1,172,757,498.53
01	8) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sukosari	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	713,118,940.46	PAD		100%	733,565,356.52
01	9) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sukorejo	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,778,859,915.74	PAD		100%	1,829,863,062.46
01	10) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kauman	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,448,419,690.08	PAD		100%	2,518,620,332.40
01	11) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrandu	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,199,209,645.06	PAD		100%	1,233,593,165.06
01	12) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Badegan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,235,761,950.07	PAD		100%	2,299,865,308.50
01	13) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jambon	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,387,172,252.63	PAD		100%	2,455,616,819.61
01	14) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sampung	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	846,785,145.93	PAD		100%	871,064,015.02
01	15) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kunti	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	448,224,865.40	PAD		100%	461,076,286.91
01	16) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Balong	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	2,900,434,606.77	PAD		100%	2,983,595,338.26

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01	17) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Slahung	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,993,637,125.66	PAD		100%	2,050,798,325.33
01	18) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Nailan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,330,127,452.24	PAD		100%	1,368,264,623.70
01	19) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bungkal	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,743,447,306.77	PAD		100%	1,793,435,109.63
01	20) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngrayun	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	4,410,617,887.94	PAD		100%	4,537,078,318.74
01	21) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sambit	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,437,618,258.21	PAD		100%	1,478,837,386.43
01	22) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wringinanom	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	861,171,491.10	PAD		100%	885,862,842.86
01	23) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sawoo	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	3,217,302,975.72	PAD		100%	3,309,548,899.23
01	24) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bondrang	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	329,889,852.68	PAD		100%	339,348,394.31
01	25) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mlarak	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,454,835,004.05	PAD		100%	1,496,547,767.66
01	26) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Jetis	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,797,276,271.56	PAD		100%	1,848,807,448.68

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
01	27) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pulung	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,955,117,387.25	PAD		100%	2,011,174,156.01
01	28) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kesugihan	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	856,761,479.74	PAD		100%	881,326,388.46
01	29) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sooko	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,001,877,255.71	PAD		100%	1,030,602,897.46
01	30) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ngebel	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	1,333,619,244.95	PAD		100%	1,371,856,532.45
01	31) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pudak	a) Persentase operasional puskesmas yang dilaksanakan sesuai rencana	Puskesmas	100%	603,136,830.42	PAD		100%	620,429,859.50
1.02.02	2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	a. Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinkes	95	70,506,515,819	APBD		94.08	81,717,920,131
		b. Angka Kematian Bayi (AKB)		11.95				11.93	
		c. Prevalensi balita stunting		<20%				<20%	
		d. Indeks Kepuasan Masyarakat		89				89	
		e. % puskesmas terakreditasi		100%				100%	
		f. % Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		3.7%				4.2%	
		g. CFR Covid-19		<8%				<6%	
		h. CFR HIV/AIDS		30%				28%	
		i. CFR TB paru		5.26				5.16	
		j. Persentase Desa Bebas DBD		50%				52%	
		k. Proporsi penderita kusta anak		0%				0%	
		l. Persentase Desa UCI		89%				90%	
		m. Prevalensi Hipertensi		40.17%				40.12%	
		o. Prevalensi Diabetes melitus		2.13%				2.08%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.01	1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	a.1 Persentase bangunan RS Tipe D memenuhi standar	Dinkes	80%	20,146,980,094	APBD		100%	30,378,835,921
		b.1 Persentase bangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas yang memenuhi standar		100%				100%	
		c.1 Persentase puskesmas memiliki IPAL sesuai dengan standar		0%				0%	
		d.1 Persentase puskesmas dengan ketersediaan alkes memenuhi standar		100%				100%	
		e.1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin puskesmas sesuai standar		100%				100%	
		f.1 Persentase ketersediaan BMHP puskesmas sesuai standar		100%				100%	
01	1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	a) Persentase standar kebutuhan bangunan RS tipe D dibangun sesuai rencana	Dinkes	100%	6,179,418,081	APBD		100%	12,317,700,573
02	2) Pembangunan Puskesmas	a) Persentase pembangunan puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	2,203,887,593	APBD		100%	3,323,155,097
09	3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	a) Persentase rehab / renovasi puskesmas/ pustu/ rumah dinas sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	-	APBD		100%	
13	4) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	2,839,975,732	APBD		100%	3,282,287,290
14	5) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	a) Persentase pengadaan alkes sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	2,556,755,598	APBD		100%	3,855,230,830
15	6) Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	a) Persentase alkes yang terkalibrasi sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	114,813,096	APBD		100%	173,122,135
16	7) Pengadaan Obat, Vaksin	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis obat dan vaksin sesuai rencana	Dinkes	100%	2,077,494,459	APBD		100%	3,132,571,879

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
17	8) Pengadaan Bahan Habis Pakai	a) Persentase pengadaan jumlah dan jenis BMHP sesuai rencana	Dinkes	100%	4,000,105,913	APBD		100%	4,031,601,791	
21	9) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	a) Persentase operasional distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP dan makanan minuman sesuai dengan rencana	Dinkes	100%	174,529,621	APBD		100%	263,166,326	
2.02	1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a.2 Persentase K4	Dinkes	90%	50,086,823,250	APBD		90%	51,063,233,301	
		b.2 Persentase persalinan oleh nakes		97%				98%		
		c.2 Persentase peserta KB aktif		70%				70%		
		d.2 Persentase pelayanan kesehatan pada balita		100%				100%		
		e.2 Persentase pelayanan kesehatan pada anak SD		100%				100%		
		f.2 Persentase pelayanan kesehatan pada remaja		100%				100%		
		g.2 Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut		100%				100%		
		h.2 Persentase gizi buruk mendapat perawatan		100%						
		i.2 Persentase penduduk yang akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat								
		j.2 Persentase pos UKK di wilayah Kerja Puskesmas								
		k.2 Persentase pelayanan kesehatan primer sesuai standar (akreditasi Utama)		10 puskesmas					10 puskesmas	
		l.2 Persentase pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar		40%					50%	
		m.2 Jmlh puskesmas dengan optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Peserta JKN		31 Pusk					31 Pusk	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		n.2 Jmlh puskesmas yang melaksanakan digitalisasi pelayanan kesehatan		31 Pusk				31 Pusk	
		o.2 Angka kesembuhan kasus konfirmasi Covid-19		80%				80%	
		p.2 Angka Keberhasilan pengobatan kasus HIV/AIDS		80%				80%	
		q.2 Success Rate pengobatan kasus TBC		90%				90%	
		r.2 RFT penderita Kusta		90%				90%	
		s.2 Persentase Desa KLB dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam		100%				100%	
		t.2 Persentase kejadian bencana dilaporkan dan ditanggulangi <24 jam		100%				100%	
		u.2 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap		93%				93%	
		v.2 Persentase Cakupan Vaksinasi Covid-19		80%				80%	
		w.2 Prevalensi ODGJ berat 10.000 penduduk		17				17	
		x.2 Persentase penderita HT yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		40%				60%	
		y.2 Persentase penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		94%				96%	
		z.2 Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan sesuai standar		92%				94%	
01	1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a) Persentase Kunjungan minimal 4x pd Bumil dgn frekuensi 1-1-2	Dinkes	100%	816,493,311	APBD		100%	832,410,317
		b) Persentase bumil komplikasi ditangani		100%				100%	
02	2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	a) Persentase neonatus komplikasi ditangani	Dinkes	100%	476,669,999	APBD		100%	485,962,371
		b) Persentase persalinan ditolong oleh Nakes yg kompeten		100%				100%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		c) Persentase penggunaan alat kontrasepsi oleh PUS		85%				85%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Dinkes		59,257,004	APBD			60,412,181
04	3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	a) Persentase balita dipantau tumbuh kembangnya	Dinkes	100%	50,596,800	APBD		100%	51,583,152
05	4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	a) Persentase murid SD dilakukan penjangkauan kesehatan	Dinkes	100%	79,603,181	APBD		100%	81,154,993
06	5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	a) Persentase remaja yang dilakukan pemantauan kesehatannya	Dinkes	100%	74,497,196	APBD		100%	75,949,470
07	6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	a) Persentase Usila mendapat skrening dan pemeriksaan kesehatan	Dinkes	100%	33,344,436	APBD		100%	33,994,465
11	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	a) Insiden rate Penyakit TB paru	Dinkes		160,842,964	APBD			163,978,493
12	8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	a) Prevalensi penyakit HIV/AIDS	Dinkes		112,052,435	APBD			114,236,825
13	9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	a) Persentase penyakit potensial KLB terpantau	Dinkes		338,324,566	APBD			344,919,983
14	10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	a) Persentase penduduk terjangkau pemberian vaksin Covid-19 sesuai dengan pendataan	Dinkes	70%	8,152,884,695	APBD		80%	8,311,819,880
		b) Jumlah pasien positif covid 19 yang diisolasi di shelter		>50%				>50%	
15	11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	a) Jumlah bayi BBLR	Dinkes		494,501,183	APBD			504,141,162
		b) Jumlah balita BGM							
		c) Jumlah Bumil KEK							
16	12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	a) Persentase Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	Dinkes	25%	102,594,255	APBD		30%	104,594,264

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		b) Persentase Pos UKK yang dibina		55%				60%	
		c) Persentase pembinaan K3 Perkantoran		25%				30%	
		d) Persentase pengukuran kebugaran jasmani jamaah haji		80%				85%	
		e) Persentase pengukuran kebugaran jasmani anak sekolah SD (kelas 4-6)		20%				30%	
		f) Presentase pembinaan terhadap kelompok / klub olahraga masyarakat		20%				30%	
		g) Persentase pengukuran kebugaran jasmani terhadap pegawai Puskesmas		40%				45%	
17	13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	a) Persentase sarana air minum yang diawasi / diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Dinkes	68%	187,801,826	APBD		72%	191,462,900
		b) Persentase desa/kel STBM		6%				7%	
		c) Persentase rumah tangga akses air bersih memenuhi syarat		93%				94%	
		d) Persentase TFU memenuhi syarat		67%				69%	
		e) Persentase TPP memenuhi syarat		55%				57%	
		f) Persentase pasien penderita penyakit berbasis lingkungan yang dikonseling di Klinik Sanitasi		10%/ 20%/ 40%				10%/ 20%/ 40%	
18	14) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	a) Jumlah kegiatan promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	Dinkes		206,480,295	APBD			210,505,494
		b) Persentase kegiatan promosi dilaksanakan sesuai rencana							

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
19	15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	a) Persentase petugas puskesmas yang mendapatkan pengetahuan tentang pelayanan kesehatan tradisional	Dinkes	100%	73,134,539	APBD		100%	74,560,249
		b) Persentase sarana pengobatan tradisional yang dibina		100%				100%	
		c) Persentase kelompok asman toga yang terbentuk		40%				50%	
		d) Persentase hattra yang memiliki STPT		100%				100%	
20	16) Pengelolaan Surveilans Kesehatan	a) Jumlah penemuan kasus AFP pada penduduk usia < 15 tahun	Dinkes	5%	286,159,651	APBD		5%	291,738,147
		b) Persentase pemeriksaan kesehatan CJH		100%				100%	
		c) Imunisasi Lanjutan Baduta (usia 18 sd 24 bulan)		95%				95%	
		d) Imunisasi DT pada anak kelas 1 SD		95%				95%	
		e) Imunisasi Campak pada anak kelas 1 SD		95%				95%	
		f) Imunisasi Td pada anak SD kelas 2 dan 5		95%				95%	
		g) Imunisasi TT 5 pada WUS (15-49 th)		85%				85%	
		h) Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 th)		85%				85%	
		i) Pemantauan suhu, VVM, serta Alarm Dingin pada lemari es penyimpan vaksin		80%				80%	
		j) Ketersediaan buku catatan stok vaksin sesuai dengan jumlah vaksin program imunisasi serta pelarutnya		100%				100%	
		k) Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius		90%				90%	
22	17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	a) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Posyandu Keswa di wilayahnya	Dinkes	32%	583,384,333	APBD		48%	594,757,032

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		b) Persentase desa/kelurahan bebas pasung		97%				98%	
23	18) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	a) Persentase operasional kegiatan di PMI dilaksanakan sesuai rencana	Dinkes	100%	176,738,857	APBD			180,184,266
25	19) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	a) Insiden rate penyakit TB paru	Dinkes	130 per 100.000 penduduk	634,117,368	APBD		150 per 100.000 penduduk	646,479,074
		b) Angka Bebas Jentik (ABJ)		90%				90%	
		c) Prevalensi penyakit Kusta		0,6 per 10.000 penduduk				0,5 per 10.000 penduduk	
		d) Angka Kejadian Malaria (API)		0,01 per 1000 penduduk				0,01 per 1000 penduduk	
		e) Persentase penemuan dan pengobatan kasus leptospirosis		100%				100%	
		f) Persentase penemuan dan pengobatan kasus filariasis		100%				100%	
		g) Persentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita		90%				90%	
		h) Persentase penemuan dan pengobatan kasus diare		90%				90%	
		i) Persentase Puskesmas yang menerapkan Pelayanan Terpadu (Pandu) PTM sesuai standar		40%				60%	
		j) Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan Posbindu PTM		96%				97%	
		k) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Posyandu Keswa di wilayahnya		32%				48%	
		i) Persentase desa/kelurahan bebas pasung		97%				98%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		m) Persentase puskesmas yang melakukan deteksi dini gangguan indera pada minimal 40% sarannya.		20%				40%	
		n) Persentase puskesmas yang melaksanakan UKGM di wilayahnya.		20%				40%	
26	20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	a) Persentase masyarakat miskin yang masuk dalam pembiayaan jaminan kesehatan daerah	Dinkes	100%	11,660,831,055	APBD		100%	11,888,151,375
		b) Jmlh puskesmas dengan indikator angka kontak dengan rating 4		31 pkm				31 pkm	
		c) Jmlh puskesmas dengan indikator RRNS dengan rating 4		31 pkm				31 pkm	
		d) Jmlh puskesmas dengan indikator RPPT dengan rating 4		31 pkm				31 pkm	
33	21) Puskesmas Ponorogo Utara (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		592,571,408	APBD			604,123,203
33	22) Puskesmas Ponorogo Selatan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		847,545,563	APBD			864,067,912
33	23) Puskesmas Siman (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		647,373,495	APBD			659,993,621
33	24) Puskesmas Ronowijayan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		711,232,192	APBD			725,097,202
33	25) Puskesmas Jenangan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,224,438,290	APBD			1,248,307,918
33	26) Puskesmas Setono (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		748,557,185	APBD			763,149,820
33	27) Puskesmas Babadan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		743,087,996	APBD			757,574,013

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
33	28) Puskesmas Sukosari (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		633,340,281	APBD		645,686,838	
33	29) Puskesmas Sukorejo (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		930,811,039	APBD		948,956,595	
33	30) Puskesmas Kauman (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		710,063,751	APBD		723,905,982	
33	31) Puskesmas Ngrandu (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		553,214,059	APBD		563,998,607	
33	32) Puskesmas Badegan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		816,374,597	APBD		832,289,289	
33	33) Puskesmas Jambon (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		852,723,705	APBD		869,346,999	
33	34) Puskesmas Sampung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		767,163,179	APBD		782,118,526	
33	35) Puskesmas Kunti (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		632,365,579	APBD		644,693,135	
33	36) Puskesmas Balong (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,372,005,901	APBD		1,398,752,264	
33	37) Puskesmas Slahung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		860,618,883	APBD		877,396,088	
33	38) Puskesmas Nailan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		659,771,283	APBD		672,633,095	
33	39) Puskesmas Bungkal (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		1,067,651,244	APBD		1,088,464,411	
33	40) Puskesmas Ngrayun (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		964,350,110	APBD		983,149,488	
33	41) Puskesmas Sambit (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		741,832,176	APBD		756,293,712	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
33	42) Puskesmas Wringinanom (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		704,688,202	APBD		718,425,640	
33	43) Puskesmas Sawoo (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		779,700,725	APBD		794,900,484	
33	44) Puskesmas Bondrang (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		460,557,761	APBD		469,536,035	
33	45) Puskesmas Mlarak (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		860,964,628	APBD		877,748,574	
33	46) Puskesmas Jetis (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		782,974,748	APBD		798,238,331	
33	47) Puskesmas Pulung (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		924,987,812	APBD		943,019,848	
33	48) Puskesmas Kesugihan (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		797,020,950	APBD		812,558,355	
33	49) Puskesmas Sooko (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		646,339,051	APBD		658,939,010	
33	50) Puskesmas Ngebel (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		731,978,429	APBD		746,247,872	
33	51) Puskesmas Pudak (BOK)	a) Persentase Nilai PKP	Puskesmas		549,907,057	APBD		560,627,138	
34	52) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	a) Persentase operasional GFK dilaksanakan sesuai rencana	IFK / Labkesda		526,121,596	APBD		536,377,994	
		b) Persentase operasional LABKESDA dilaksanakan sesuai rencana							
35	53) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	a) Jumlah puskesmas ditetapkan status akreditasi UTAMA	Dinkes	10 puskesmas	35,278,843	APBD	10 puskesmas	35,966,581	
37	54) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	a) Jumlah penyakit potensial KLB yang dipantau	Dinkes		111,062,698	APBD		113,227,793	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		b) Jumlah penemuan kasus bukan campak pada populasi							
38	54) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	a) Persentase puskesmas yang melaksanakan penugasan dari call centre PSC	Dinkes	80%	337,838,888	APBD		80%	344,424,837
		b) Persentase tim krisis kesehatan puskesmas yang dibina		70%				70%	
		c) Persentase tim ambulan desa siaga menjaga standar kelengkapan dan fungsi ambulan desa siaga yang dibina		100%				100%	
2.03	1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	a.3 Persentase sistem informasi dikelola sesuai dengan peruntukannya	Dinkes		91,811,506	APBD			92,868,093
02	1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	a) Persentase rekomendasi surat ijin penelitian yang diterbitkan		100%	91,811,506			100%	92,868,093
		b) Jumlah aplikasi pelaporan dikelola sesuai peruntukannya		8 apl				8 apl	
2.04	1.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.4 Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Dinkes	5 RS	180,900,968.61	APBD		6 RS	182,982,816.00
		b.4 Jumlah puskesmas yang melaksanakan digitalisasi pelayanan kesehatan		31 pus				31 pus	
01	1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	a) Jumlah rumah sakit ditetapkan status akreditasi PARIPURNA	Dinkes	5 RS	18,610,601.63	APBD		6 RS	18,824,776
		b) Jumlah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan PPGD sesuai kelas Rumah Sakit		100%				100%	
03	2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	a) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kunjungan keluarga dan intervensi lanjut	Dinkes	31 pus	162,290,366.98	APBD		31 pus	164,158,040
		b) Prosentase masyarakat yang memanfaatkan JAPRIDOKTER		1%				1%	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		c) Jumlah puskesmas yang melaksanakan digitalisasi pelayanan kesehatan		31 puskesmas				31 puskesmas	
1.02.03	3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinkes	88%	10,458,929,968	APBD		88%	13,721,426,151
2.02	1.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	a.1 Prosentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes	100%	9,800,912,938	APBD		100%	12,858,151,216
02	1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	a) Jumlah perawat puskesmas aktif	Dinkes	181 org	9,800,912,938	APBD		181 org	12,858,151,216
		b) Jumlah dokter kontrak aktif		11 org				11 org	
2.03	1.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.2 Prosentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes	100%	658,017,030	APBD		100%	863,274,935
01	1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	a) Prosentase ASN bidang kesehatan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan sesuai rencana	Dinkes	100%	658,017,030	APBD		100%	863,274,935
		b) Persentase pejabat fungsional memenuhi angka kredit dan mengikuti dan lulus UKOM		100%				100%	
1.02.04	4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinkes	90%	355,866,067	APBD		90%	362,110,632
2.01	1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a.1 Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki ijin usaha	Dinkes	100%	-	APBD		100%	-

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
02	1) Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	a) Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) diberikan rekomendasi ijin usaha	Dinkes	100%	-	APBD		100%	-
2.03	1.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	a.2 Persentase cakupan SPKP dan SPPIRT yang diterbitkan	Dinkes	100%	202,593,560	APBD		100%	206,148,573
01	1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi	a) Jumlah SPKP yang diterbitkan b) Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan	Dinkes	20 100%	202,593,560	APBD		20 100%	206,148,573
2.06	1.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	a.3 Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar kesehatan	Dinkes	100%	153,272,507	APBD		100%	155,962,059
01	1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	a) Persentase Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemantauan layak sehatnya	Dinkes	100%	153,272,507	APBD		100%	155,962,059
1.02.05	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	a. Angka Kematian Ibu (AKI) b. Angka Kematian Bayi (AKB) c. Prevalensi balita stunting	Dinkes	94%	3,605,078,000	APBD		94%	3,697,193,000
2.01	1.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	a.1 Persentase rumah tangga dikaji b.1 Persentase Institusi Pendidikan yang dikaji c.1 Persentase Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji d.1 Persentase kader posyandu dibina	Dinkes	20% 50% 60% 100%	3,605,078,000	APBD		20% 50% 60% 100%	3,697,193,000

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Catatan penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		e.1 Persentase UKBM yang diukur & dibina tingkat perkembangannya		100%				100%	
		f.1 Persentase kader desa siaga yang dibina		85%				85%	
01	1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	a) Persentase masyarakat yang diberi penyuluhan kesehatan	Dinkes	100%	3,605,078,000	APBD		100%	3,697,193,000
		b) Persentase sekolah pendidikan dasar yang diberi penyuluhan kesehatan		80%				90%	
		c) Persentase pondok pesantren yang diberi penyuluhan kesehatan		94%				94%	
TOTAL ANGGARAN					207,668,768,320.32				225,765,741,295.45

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan sasaran perangkat daerah yaitu (1) meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan; dan (3) menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa, pada periode Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 telah ditetapkan program, kegiatan beserta alokasi anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dinas Kesehatan beserta Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yaitu 31 puskesmas, Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dan Laboratorium Kesehatan Daerah dibantu oleh UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, poskestren, desa siaga, poskesdes dan polindes selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik melalui peningkatan mutu dan akses sehingga kebutuhan masyarakat akan kesehatan terpenuhi yang digambarkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sehingga tujuan pembangunan kesehatan bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Ponorogo.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kd_Tujuan	Tujuan	Kd_Sasaran	Sasaran	Kd_Program	Program	Pagu Program 2021 (e-Planning)	Pagu Program 2021 (Penyesuaian)	Kd_Kegi-atan	Kegiatan	Pagu Kegiatan 2021 (e-Planning)	Pagu Kegiatan 2021 (Penyesuaian)	SKPD
1.02.01	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1.1	Meningkatkan kegiatan pelayanan umum, sarana prasarana kantor, pelaporan SKPD serta pemenuhan kebutuhan kantor lainnya	1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	122,742,378,466.71	116,962,608,964	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	256,273,569	256,273,569	Dinas Kesehatan
								1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72,738,656,400	69,313,493,280	
								1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446,432,701	425,410,800	
								1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615,632,905	586,643,600	
								1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733,591,406	699,047,597	
								1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288,998,019	275,389,500	
								1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	47,662,793,467	45,418,418,187	
		1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	70,506,515,819	79,786,094,643	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	50,086,823,250	56,678,903,698	
								1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,605,078,000	2,099,251,500	1.02.05.2.01
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	70,506,515,819	79,786,094,643	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/	20,146,980,094	22,798,585,945	
								1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	91,811,506	103,895,100	
								1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	180,900,969	204,709,900	
				1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10,458,929,968	5,563,116,637	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	9,800,912,938	5,213,116,637	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan							658,017,030	350,000,000			
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	355,866,067	254,700,000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-					

Kd_Tujuan	Tujuan	Kd_Sasaran	Sasaran	Kd_Program	Program	Pagu Program 2021 (e-Planning)	Pagu Program 2021 (Penyesuaian)	Kd_Kegi-atan	Kegiatan	Pagu Kegiatan 2021 (e-Planning)	Pagu Kegiatan 2021 (Penyesuaian)	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	202,593,560	145,000,000	
									Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	153,272,507	109,700,000	
		1.4	Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dan gangguan kesehatan jiwa	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70,506,515,819	79,786,094,643	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,086,823,250	56,678,903,698	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2022 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan tahun 2022, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2022, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai tujuan dan sasaran, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana Kerja Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ponorogo, 28 September 2021

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PONOROGO
SELUKU PENGGUNA ANGGARAN



Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700111 198903 1 002